

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5253004 (8 Saluran) Ext. 212,222 Faksimile (021) 5253157
Website www.kemenkumham.go.id

Nomor : SEK.2.KP.05.01-110

11 September 2015

Lampiran :

Perihal : Ralat Pengumuman Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Sarjana (S1) dan Magister (S2) Tahun 2015

Yth

(Daftar Alamat Terlampir)

Di Tempat

Sehubungan dengan surat pengumuman pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Nomor SEK.2.KP.05.01-93 tanggal 26 Agustus 2015, bersama ini diberitahukan bahwa:

1. Dalam surat pengumuman dimaksud dalam persyaratan huruf f disebutkan "Ijazah diperoleh dari perguruan tinggi dengan akreditasi minimal B" dan huruf g disebutkan "Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,75"
2. Terdapat usulan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Wilayah Indonesia Timur dan Tengah agar Akreditasi B dalam persyaratan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ditinjau kembali dan dapat dirubah menjadi akreditasi C dikarenakan banyak pegawai yang telah selesai menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dengan Akreditasi C dengan alasan Perguruan Tinggi Akreditasi B adanya di Ibukota Propinsi terutama di Wilayah Timur dan perlu standar IPK yang berbeda untuk lulusan dari Perguruan Tinggi dan Swasta.
3. Mencermati dan mengkaji semua usulan terkait persyaratan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI nomor M.HH-03.KP.05.01 Tahun 2009 Tanggal 3 Juni 2009 tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Departemen Hukum Dan HAM RI dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 Tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil. Dengan tujuan untuk mendorong pengembangan Karir pegawai maka persyaratan huruf f "Ijazah diperoleh dari perguruan tinggi dengan akreditasi minimal B" dirubah menjadi "**Bagi yang lulus dan memperoleh ijazah sebelum terbitnya Surat Edaran MENPAN dan RB minimal Akreditasi C, dan bagi yang lulus dan memperoleh Ijazah setelah terbitnya Surat Edaran MENPAN dan RB minimal Akreditasi B**" dan huruf g "Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,75" dirubah menjadi "**Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,50 untuk Perguruan Tinggi Negeri dan 2,75 untuk Perguruan Tinggi Swasta**"

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

Kepala Biro Kepegawaian

Drs. M. ARIFIN H.A., MM
NIP. 19591202 198103 1 001



Lampiran Surat Sekretaris Jenderal

Nomor : SEK.2.KP.05.01-110

Tanggal : 11 September 2015

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.
Up. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI.
Up. Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI.
Up. Sekretaris Direktorat Jenderal
4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI.
Up. Sekretaris Direktorat Jenderal
5. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI.
Up. Sekretaris Direktorat Jenderal
6. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.
Up. Sekretaris Direktorat Jenderal
7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI.
Up. Sekretaris Direktorat Jenderal
8. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
Up. Sekretaris Badan
9. Kepala Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI.
Up. Sekretaris Badan
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI.
Up. Sekretaris Badan
11. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI
12. Kepala Biro Kepegawaian
13. Kepala Biro Umum.
14. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri.
15. Kepala Biro Perencanaan.
16. Kepala Biro Perlengkapan.
17. Kepala Biro Keuangan.
18. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI